

## **BAB IV**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

##### **4.1.1. Kondisi Geografis**

Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk sejak masa kolonial Belanda tahun 1925. Namun demikian, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 4 Juli 1950, saat ditetapkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah. Pusat pemerintahannya berada di Bandung. Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara antara  $5^{\circ} 50'$  –  $7^{\circ} 50'$  Lintang Selatan dan  $104^{\circ} 48'$ -  $108^{\circ} 48'$  Bujur Timur. Dengan luas wilayah  $37.851.11 \text{ km}^2$ , wilayah Jawa Barat berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta di sebelah utara, di timur berbatasan dengan Jawa Tengah, di selatan dengan Samudera Hindia dan di barat berbatasan dengan Provinsi Banten.

Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sebesar  $971,72 \text{ km}^2$ . Secara Geografis, kabupaten Purwakarta terletak antara  $107^{\circ} 30'$ - $107^{\circ} 40'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 25'$ - $6^{\circ} 45'$  Lintang Selatan, dan berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung, dan Purwakarta-Cirebon.

Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Banyaknya Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Kecamatan	Luas Daerah (km <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5
<b>Kabupaten</b>				
Bogor	Cibinong	435	40	2710.62
Sukabumi	Sukabumi	386	47	4145.7
Cianjur	Cianjur	360	32	3840.16
Bandung	Soreang	280	31	1767.96
Garut	Garut	442	42	3074.07
Tasikmalaya	Tasikmalaya	351	39	2551.19
Ciamis	Ciamis	265	27	1414.71
Kuningan	Kuningan	376	32	1110.56
Cirebon	Sumber	424	40	984.52
Majalengka	Majalengka	343	26	1204.24
Sumedang	Sumedang	277	26	1518.33
Indramayu	Indramayu	317	31	2040.11
Subang	Subang	253	30	1893.95
Purwakarta	Purwakarta	192	17	825.74
Karawang	Karawang	309	30	1652.2
Bekasi	Cikarang	187	23	1224.88
Bandung Barat	Ngamprah	165	16	1305.77
Pangandaran	Parigi	93	10	1010
<b>Kota</b>				
Kota Bogor	Bogor	68	6	118.5
Kota Sukabumi	Sukabumi	33	7	48.25
Kota Bandung	Bandung	151	30	167.67
Kota Cirebon	Cirebon	22	5	37.36
Kota Bekasi	Bekasi	56	12	206.61
Kota Depok	Depok	63	11	200.29
Kota Cimahi	Cimahi	15	3	39.27
Kota Tasikmalaya	Tasikmalaya	69	10	171.61
Kota Banjar	Banjar	25	4	113.49
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Bandung</b>	<b>5957</b>	<b>627</b>	<b>35377.76</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

Luas wilayah terbesar yaitu berada pada Kabupaten Cianjur dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 360 dan jumlah kecamatan 32. Keadaan cuaca pada Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Keadaan Cuaca di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Bulan	Suhu Udara			Kecepatan Angin Rata - rata (m/det)	Rata - rata Kelembapan Udara (%)	Jumlah Curah Hujan (mm2)	Banyaknya Hari Hujan (Hari)
	Maksimum	Minimum	Rata - rata				
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	32	19.8	24	5.1	81	207.6	14
Februari	32.2	19.7	23.6	4	78	336.6	18
Maret	31.6	19.9	24	3.1	81	292.5	19
April	31.4	18.2	23.9	3	82	271.4	19
Mei	31.8	19.4	24	2.8	82	292.3	15
Juni	31.2	18.6	23.8	3.4	76	30.3	5
Juli	31.4	16	23	3.8	73	63.7	7
Agustus	32.4	16.8	23.8	3.6	73	41.6	4
September	33	15.9	24.2	4	70	87.7	7
Oktober	32	19	23.7	3.6	78	327.3	17
November	24.2	18	24	3.4	77	207.3	16
Desember	31	19.6	23.8	5.2	77	262.1	18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

#### 4.1.2. Batas Wilayah Administrasi



Sumber : jabarprov.go.id, 2021

Gambar 4.1. Peta Administratif Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan batas administrasi, Provinsi Jawa Barat memiliki batas-batas sebagai berikut :

Tabel 4.3. Batas Administrasi Provinsi Jawa Barat

Bagian	Batas Wilayah Administrasi
Utara	Laut Jawa
Selatan	Samudera Hindia
Barat	Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
Timur	Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Batas administrasi dari Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Batas Administrasi Kabupaten Purwakarta

Bagian	Batas Wilayah Administrasi
Utara	Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang
Selatan	Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur
Barat	Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor
Timur	Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat

Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2021

Peta administrasi dapat dilihat pada gambar 4.2. Peta administrasi menggambarkan letak kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat.



Sumber : [ppid.purwakarta.go.id](http://ppid.purwakarta.go.id)

Gambar 4.2. Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta

#### 4.1.3. Kependudukan

Sensus penduduk tahun 2020 mencatat, penduduk Provinsi Jawa Barat pada bulan September 2020 adalah sebanyak 48,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami penambahan sekitar 5,2 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 0,44 juta setiap tahun.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Per Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin
1	2	3	4	5
<b>Kabupaten</b>				
Bogor	5 427,07	11,24	2 002	105,8
Sukabumi	2 725,45	5,65	657	103,4
Cianjur	2 477,56	5,13	645	105,4
Bandung	3 623,79	7,51	2 050	104,1
Garut	2 585,61	5,36	841	105,1
Tasikmalaya	1 865,20	3,86	731	102,9
Ciamis	1 229,07	2,55	869	100,3
Kuningan	1 167,69	2,42	1 051	102,8
Cirebon	2 270,62	4,70	2 306	103,0
Majalengka	1 305,48	2,70	1 084	101,1
Sumedang	1 152,51	2,39	759	102,0
Indramayu	1 834,43	3,80	899	101,2
Subang	1 595,32	3,30	842	100,6
Purwakarta	997,87	2,07	1 208	103,2
Karawang	2 439,09	5,05	1 476	102,7
Bekasi	3 113,02	6,45	2 541	103,2
Bandung Barat	1 788,34	3,70	1 370	104,3
Pangandaran	423,67	0,88	419	100,4
<b>Kota</b>				
Kota Bogor	1 043,07	2,16	8 802	103,0
Kota Sukabumi	346,33	0,72	7 178	101,4
Kota Bandung	2 444,16	5,06	14 577	101,5
Kota Cirebon	333,30	0,69	8 921	100,8
Kota Bekasi	2 543,68	5,27	12 311	101,6
Kota Depok	2 056,34	4,26	10 267	101,9
Kota Cimahi	568,40	1,18	14 474	101,9
Kota Tasikmalaya	716,16	1,48	4 173	103,2
Kota Banjar	200,97	0,42	1 771	100,8
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>48 274,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1 365</b>	<b>103,1</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

Penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 997.869 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 hasil sensus penduduk 2020 Kabupaten Purwakarta mengalami pertumbuhan sebesar 145 ribu jiwa.

Tabel 4.6. Nama Kecamatan, Luas, dan Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jatiluhur	10	60.11	73,953
2	Sukasari	5	92.01	17,258
3	Maniis	8	71.64	36,052
4	Tegalwaru	13	73.23	53,184
5	Plered	16	31.48	83,425
6	Sukatani	14	95.43	76,907
7	Darangdan	15	67.39	70894
8	Bojong	14	68.69	52998
9	Wanayasa	15	56.55	43303
10	Kiarapedes	10	52.16	28387
11	Pasawahan	12	36.96	49458
12	Pondoksalam	11	44.08	30734
13	Purwakarta	10	24.83	179233
14	Babancikao	9	42.4	59909
15	Campaka	10	43.6	50342
16	Cibatu	10	56.5	31267
17	Bungursari	10	54.66	60565
<b>TOTAL</b>		<b>192</b>	<b>971.72</b>	<b>997869</b>

Sumber : Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2021

#### 4.1.4. Komoditi Daerah

##### 1. Pertanian Tanaman Pangan

Pada tahun 2020, tercatat luas panen padi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.613.828,78 Ha dengan produksi sebesar 9.219.866 ton, sedangkan produksi beras tercatat sebesar 5.296.892,02 ton. Kabupaten Purwakarta memiliki luas panen padi sebesar 40.831 Ha dengan produksi sebesar 254.897 ton, sedangkan produksi beras tercatat sebesar 254.897 ton pada tahun 2020.

##### 2. Hortikultura

Pada tahun 2020, produksi buah-buahan terbesar adalah pisang yaitu sebesar 12.354.122 kwintal, untuk tanaman hias produksi terbesar adalah krisan yaitu 143.927.293 tangkai. Sementara itu produksi sayur sayuran di Jawa Barat didominasi oleh tomat sebesar 2.992.675 kwintal, untuk tanaman biofarmaka produksi terbesar adalah kapulaga sebesar 58.246.793 kg dan disusul oleh jahe sebesar 33.509.246 kg. Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Purwakarta didominasi oleh tanaman cabai dengan jumlah produksinya pada tahun 2020 mencapai 8.295,1 ton, sedangkan produksi buah-buahan

didominasi oleh pisang dengan jumlah produksinya yaitu sebesar 1.732.080 kwintal, untuk tanaman hias didominasi oleh tanaman mawar dengan jumlah produksinya yaitu sebesar 80.009 tangkai, dan untuk tanaman biofarmaka didominasi oleh tanaman kapulaga dengan jumlah produksinya yaitu sebesar 1.203.096 kg.

### 3. Perkebunan

Provinsi Jawa Barat memiliki perkebunan yang dikelola oleh perkebunan besar milik negara dan swasta serta perkebunan rakyat. Komoditi potensialnya adalah teh, kelapa, kelapa sawit, tebu dan karet. Pada tahun 2020, luas areal perkebunan yang terluas adalah tanaman kelapa seluas 144.928 Ha dan luas areal Perkebunan Rakyat terkecil adalah tanaman jambu mete seluas 107 Ha. Sedangkan produksi hasil perkebunan rakyat yang terbesar adalah kelapa deras sebanyak 153.142 ton. Perkebunan di Kabupaten Purwakarta didominasi oleh perkebunan kopi, teh dan kelapa. Luas areal perkebunan kopi pada tahun 2020 sebesar 401 Ha, dengan produksinya yaitu sebesar 187,46 ton. Luas areal perkebunan teh pada tahun 2020 sebesar 10 Ha, dengan produksinya yaitu sebesar 4.954,82 ton. Luas areal perkebunan kelapa pada tahun 2020 sebesar 2,2 ha, dengan produksinya yaitu sebesar 829,17 ton.

### 4. Kehutanan

Luas kawasan hutan di Jawa Barat terdiri dari 3 bagian yaitu: Hutan Lindung, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, serta Hutan Produksi. Pada tahun 2020, Hutan Lindung memiliki luas sebesar 229.221,58 Ha. Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam memiliki luas sebesar 170.658,40 Ha, sedangkan hutan produksi memiliki luas sebesar 176.181,88 Ha. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Jawa Barat, produksi kayu bulat pada tahun 2020 adalah 1.959.713,90 m<sup>3</sup>.

## 5. Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Jawa Barat berupa ternak besar, kecil dan unggas. Pada tahun 2020, jumlah ternak sapi potong sebanyak 389.251 ekor, sapi perah 118.212 ekor, kerbau 85.972 ekor, kuda 9.645 ekor, kambing 1.335.798 ekor, domba 12.272.435 ekor dan babi 7.7.20 ekor. Unggas yang dipelihara adalah jenis ayam kampung, ayam petelur dan itik. Jumlah ayam kampung/buras tahun 2020 sebanyak 27.006.467 ekor, ayam ras petelur 27.728.439 ekor, ayam pedaging 760.143.059 ekor dan itik 11.424.495 ekor. Pada tahun 2020, produksi daging ternak terbesar di provinsi Jawa Barat adalah daging ternak sapi sebesar 82.947.876 kg. Sedangkan produksi untuk daging unggas yang terbesar adalah ayam broiler/pedaging sebesar 838.148.940 kg. Ternak besar yang mendominasi di Kabupaten Purwakarta adalah kerbau dengan jumlah 14.244 ekor dan produksi dagingnya sebesar 9.261 kg, diikuti oleh sapi potong dengan jumlah 13.558 ekor dan produksi dagingnya sebesar 530.877 per tahun 2020. Sedangkan untuk ternak kecil yang mendominasi adalah domba dengan jumlah 5.349.162 ekor dan produksi dagingnya 5.578.456 kg per tahun 2020. Untuk ternak unggas yang mendominasi adalah ayam ras pedaging dengan jumlah 8.103.313 ekor per dan produksi dagingnya 33.990.778 kg per tahun 2020.

## 6. Perikanan

Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Barat memproduksi perikanan tangkap di laut sebanyak 248.778 ton dan di perairan umum sebanyak 15.068 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya hasil terbesar pada budidaya kolam air tenang sebanyak 574.105 ton dan hasil produksi terendah pada budidaya



jaring apung sebanyak 2 ton. Kabupaten Purwakarta didominasi oleh rumah tangga perikanan darat menggunakan media kolam jaring apung dengan jumlah 6.222 ha per tahun 2020.

#### 4.1.5. Perekonomian, Industri, dan Perdagangan

##### 1. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III-2020 terhadap triwulan II-2020 tumbuh sebesar 3,37 %. Peningkatan kinerja terjadi hampir disemua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan sebesar 14,70 % serta pertambangan dan penggalian turun sebesar 0,57 %. Penurunan di pertanian disebabkan oleh menurunnya kinerja tanaman pangan. Dari 17 kategori Lapangan Usaha, 15 kategori masih tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan tumbuh sebesar 46,71 % diikuti oleh jasa lainnya tumbuh sebesar 34,21 %. Penyediaan akomodasi dan perkembangan ekonomi Jawa Barat Triwulan III-2020 3 makan dan minum tumbuh sebesar 22,19 %. Transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 14,74 % serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 13,78 %. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha. Menurut data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Purwakarta, ada lebih dari 8.000 pelaku UMKM di Kabupaten Purwakarta. Para pelaku usaha ini, tersebar di hampir seluruh desa di 17 kecamatan, yang mayoritas, UMKM ini bergerak di sektor makanan dan minuman.

##### 2. Industri

Jumlah industri mikro dan kecil di Jawa Barat tahun 2018 sebanyak 536.207 perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang

terserap sebanyak 1.294.220 orang. Jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri mikro dan kecil paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Garut sebanyak 38.703 usaha. Jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri besar dan sedang Jawa Barat pada 2018 sebanyak 9.470 usaha dengan 2.156.786 orang tenaga kerja. Nilai produksi yang dihasilkan senilai dan Rp. 2.239,06 Triliun. Komoditas andalan industri kecil di Kabupaten Purwakarta antara lain, simping, emping melinjo, tape singkong, topi, keramik, genteng *press*, wayang golek, batu templek, bata merah, batu belah/*split*, aneka kue keriting, mebeulair, batako, dan percetakan. Pada tahun 2010 terdapat 133 unit perusahaan yang dikategorikan kedalam industri besar baik PMA dan PMDN, yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 71.227 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan dengan nilai investasi sebesar Rp. 25.039.930.568.362.

### 3. Perdagangan

Volume ekspor barang asal Jawa Barat tahun 2020 mencapai 8.255,93 ton yang terdiri atas ekspor migas sebanyak 646,50 ton dan non migas sebanyak 7.609,42 ton dengan total nilai FOB US\$ 26.591,08 Juta. Jika dibandingkan tahun 2019, nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 11,55 %. Terdapat beberapa pasar di Kabupaten Purwakarta sebagai pusat perdagangan untuk memajukan perekonomian masyarakat. Terbagi dua jenis pasar yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Terdapat empat pasar tradisional yang berada di Kabupaten Purwakarta, antara lain Pasar Jumaah, Pasar Wanayasa, Pasar Citeko, dan Pasar Leuwipanjang. Pasar modern di Kabupaten Purwakarta terdapat 109 pasar yang tersebar di berbagai kecamatan, terdapat empat nama besar dari pasar modern di Kabupaten Purwakarta, antara lain Alfamart, Indomart, Yomart, dan Tokma.

#### 4.2. Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam kegiatan pelayanan terhadap pengguna jasa. Kondisi sarana sangat penting untuk diperhatikan khususnya kapal yang beroperasi. Kapal tersebut melakukan kegiatan naik turun penumpang sehingga kondisinya harus tetap dipelihara. Sarana yang digunakan pada Dermaga Serpis Jatiluhur di Waduk Ir. H. Djuanda untuk melayani naik turun penumpang adalah Kapal Motor Getek.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Jawa Barat, 2021

Gambar 4.3. Kapal Motor Getek

#### 4.3. Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Prasarana yang baik dan mendukung diperlukan untuk menunjang kegiatan rutin seperti pelayanan terhadap penumpang. Berikut ini adalah prasarana dari Dermaga Serpis Jatiluhur di Waduk Ir. H. Djuanda :

1. Gedung Kantor Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur

Gedung kantor Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur memiliki luas 48 m<sup>2</sup> dan tinggi 2,5 m. Gedung Kantor Pos Pengawasan Dermaga

Serpis Jatiluhur di dalamnya terdapat ruang kantor untuk pegawai, ruang tamu, dapur, dan toilet.



*Sumber : Dokumentasi Tim PKL Jawa Barat, 2021*

Gambar 4.4. Gedung Kantor Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur

## 2. Lapangan Parkir

Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur memiliki dua lapangan parkir, yaitu lapangan parkir mobil seluas 272,61 m<sup>2</sup> dan lapangan parkir motor seluas 201,82 m<sup>2</sup>.



*Sumber : Dokumentasi Tim PKL Jawa Barat, 2021*

**Gambar 4.5. Lapangan Parkir Mobil Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur**

Lapangan motor Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur berada di dalam lingkungan kantor pos pengawasan dan aksesnya hanya untuk motor.



*Sumber : Dokumentasi Tim PKL Jawa Barat, 2021*

**Gambar 4.6. Lapangan Parkir Motor Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur**

### 3. Fasilitas Musala

Fasilitas Musala Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur memiliki luas 16,13 m<sup>2</sup> dan tinggi 2,5 m. Fasilitas musala digunakan untuk kegiatan ibadah bagi umat muslim baik para pegawai, penumpang, maupun masyarakat yang tinggal di sekitar Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur.



*Sumber : Dokumentasi Tim PKL Jawa Barat, 2021*

Gambar 4.7. Musala Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur

### 4. Toilet

Fasilitas toilet di Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur berukuran 2,24 m<sup>2</sup>. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi para pengunjung atau wisatawan Waduk Ir. H. Djuanda.



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Jawa Barat, 2021

Gambar 4.8. Toilet Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur

#### 5. Lampu Penerangan

Fasilitas lampu penerangan di Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur berjumlah sembilan buah dengan sistem dari lampu penerangan yang ada menggunakan *Solar Panel*.



Sumber : Dokuemntasi Tim PKL Jawa Barat, 2021

Gambar 4.9. Lampu Penerangan Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur

## 6. Fasilitas Sisi Perairan

Fasilitas sisi perairan yang ada di Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur adalah dermaga dengan tipe ponton yang berjumlah satu unit. Spesifikasi dari dermaga ponton yang ada di Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Spesifikasi Dermaga Ponton Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur

Spesifikasi Dermaga Ponton		
Dermaga Ponton	Panjang	7,05 Meter
	Lebar	6,50 Meter
	<i>Freeboard</i>	0,55 Meter
	<i>Draft</i>	0,15 Meter
	Bahan	Besi
	Tahun Pembuatan	2019
	Jumlah Tambatan / <i>Bolder</i>	-
	Lebar <i>Fender</i>	0,55 Meter
	Jenis <i>Fender</i>	Ban Karet
	Jumlah <i>Fender</i>	1
	Jumlah Lampu Penerangan	-
Jembatan Penghubung	Panjang	2,40 Meter
	Lebar	1,22 Meter
	Tinggi	0,40 Meter
	Bahan	Besi
	Tahun Pembuatan	2019

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Jawa Barat, 2021





Sumber : Dokumentasi Tim PKL Jawa Barat, 2021

Gambar 4.10. Dermaga Ponton Pos Pengawasan Dermaga Serpis Jatiluhur

#### 4.4. Instansi Pembina Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

##### 1. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka sejak tanggal 21 Juli 2017 dengan ditandai dengan pelantikan pejabat Balai Pengelola Transportasi Darat se Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 707 Tahun 2017 dan SK. Nomor 715 Tahun 2017 maka dibentuklah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat. Mulai saat itu untuk pertama kalinya pejabat dan staf BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat berkantor

bersama dengan Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Provinsi Jawa Barat di Jl. Setra Indah IV No. 18 Sukajadi, Bandung. Namun terhitung mulai tanggal 6 November 2007, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat telah memiliki kantor yang beralamat di Jl. Surya Sumantri No.92 Bandung.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori BPTD tipe B yang melaksanakan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial.

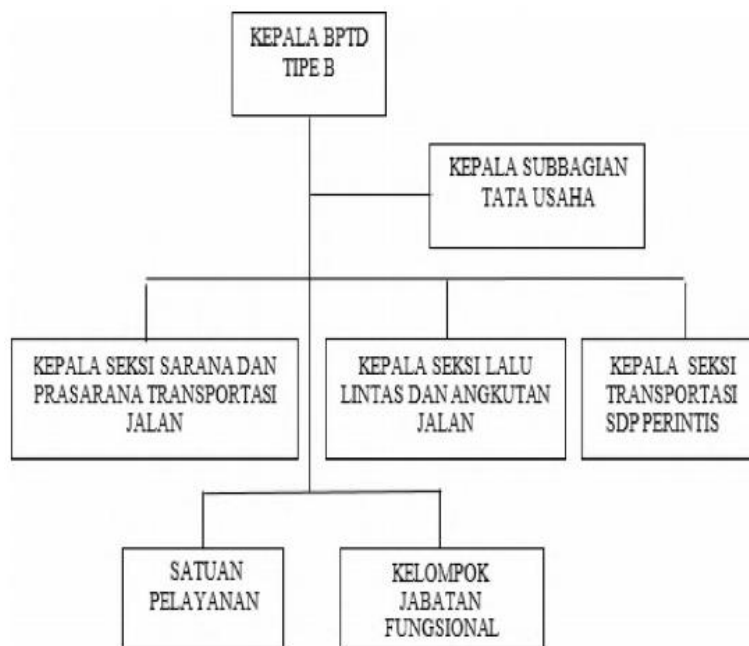
b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- 2) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
- 3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan

kinerja dan keselamatan lalu lintas, serta pengawasan tarif angkutan jalan

- 4) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kerangka kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



Gambar 4.11. Kerangka Kelembagaan BPTD Tipe B

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelaksana, dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Memimpin BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan dan pengaturan transportasi darat di wilayah kerjanya.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan

angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

d. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

e. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Perintis

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

f. Satuan Pelayanan

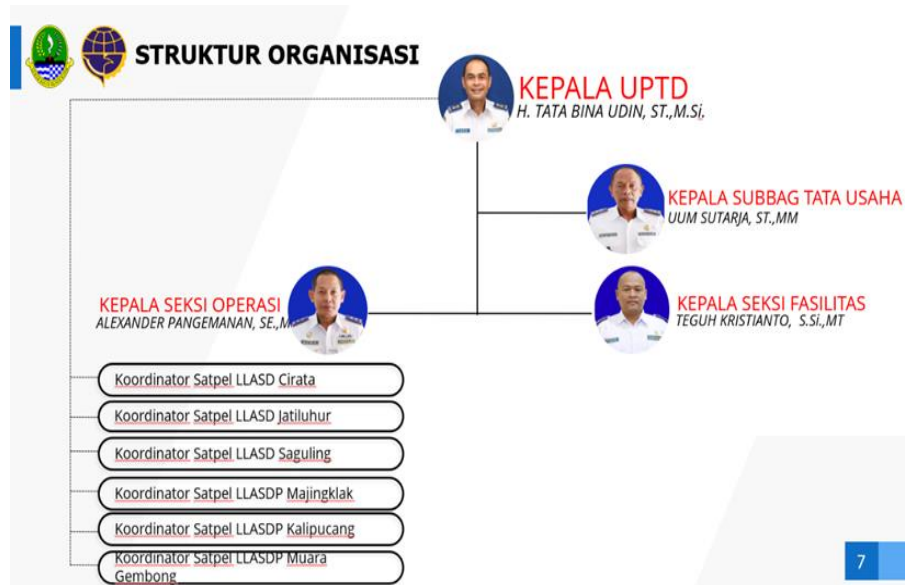
Melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (UPTD PPPLASDP)

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPPLASDP :



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPP LLASDP, 2021

Gambar 4.12. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPP LLASDP

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPP LLASDP berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 76 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPP LLASDP :

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP) yang meliputi operasi LLASDP dan fasilitas LLASDP.

b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan prasarana perhubungan LLASDP
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan prasarana Perhubungan LLASDP meliputi operasi LLASDP dan fasilitas LLASDP
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Prasarana perhubungan LLASDP
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 4.5. Produktivitas Angkutan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPPLLASDP didapatkan data produktivitas selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas penumpang tertinggi didapatkan pada tahun 2020 dengan jumlah 64.040 penumpang dan produktivitas penumpang terendah didapatkan pada tahun 2017 dengan jumlah 39.403 penumpang. Data produktivitas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.8. Data Produktivitas 5 Tahun Terakhir di Dermaga Serpis Jatiluhur

Tahun	Turun dan Naik Penumpang (Orang)
2016	46.600
2017	39.403
2018	54.553
2019	41.986
2020	64.040

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPPLLASDP

Selain mendapatkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPLLASDP, dilakukan juga survey produktivitas selama 14 hari. Data produktivitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9. Data kedatangan dan keberangkatan penumpang kapal selama 14 hari di Dermaga Serpis Jatiluhur

Hari / Tanggal	Interval waktu								Jumlah
	08.00 - 09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00	
Senin, 05 April 2021	10	11	7	8	10	15	15	4	80
Selasa, 06 April 2021	15	7	10	16	7	25	10	13	103
Rabu, 07 April 2021	16	18	15	14	10	20	14	12	121
Kamis, 08 April 2021	7	23	16	15	16	10	12	13	112
Jumat, 09 April 2021	10	3	8	4	10	15	10	12	72
Sabtu, 10 April 2021	10	16	7	13	21	23	8	12	100
Minggu, 11 April 2021	6	10	16	15	15	9	21	10	102
Senin, 12 April 2021	10	13	12	11	7	10	9	12	84
Selasa, 13 April 2021	9	18	11	14	15	12	10	15	114
Rabu, 14 April 2021	5	25	10	15	20	17	20	14	126
Kamis, 15 April 2021	12	8	13	20	13	19	20	10	122
Jumat, 16 April 2021	8	10	2	11	15	8	11	7	72
Sabtu, 17 April 2021	10	25	10	8	12	9	17	12	111
Minggu, 18 April 2021	10	8	19	16	11	10	12	15	101

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Jawa Barat 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hari rabu merupakan jumlah terbanyak kedatangan dan keberangkatan penumpang. Jumlah terendah berada pada hari jumat.

#### 4.6. Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Berdasarkan KM No.73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, jaringan trayek di Waduk Ir. H. Djuanda tergolong kedalam trayek tidak tetap dan tidak teratur, karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

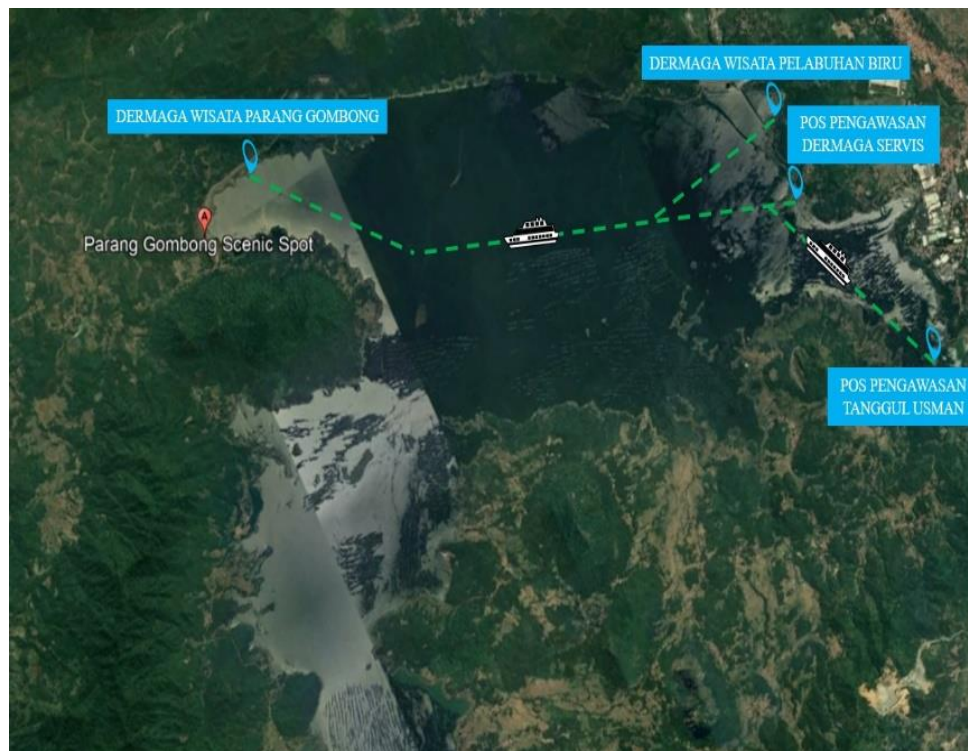
1. Pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan
2. Tidak berjadwal
3. Penyewaan/charter dapat dilakukan dengan/maupun tanpa awak kapal

Pengangkutan penumpang serta bongkar muat barang dan hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur dilaksanakan berdasarkan sewa atau *charter*, dengan trayeknya yang tidak dibatasi dan khusus untuk



angkutan penumpang tergolong kedalam angkutan wisata. Berikut ini adalah sistem trayek yang dilakukan oleh operator kapal berdasarkan wilayah penelitian di Waduk Ir. H. Djuanda :

Sumber : Hasil Analisa Tim PKL Jawa Barat, 2021



Gambar 4.13. Sistem Trayek Operator Kapal Waduk Ir. H. Djuanda

Adapun rute yang berada pada Waduk Ir. H. Djuanda :

Tabel 4.10. Rute pada Waduk Ir. H. Djuanda

No	Rute	Jarak
1	Dermaga Serpis Jatiluhur – Pelabuhan Biru	5 km
2	Dermaga Serpis Jatiluhur – Tanggul Usman	4,55 km
3	Dermaga Serpis Jatiluhur – Parang Gombong	10 km
4	Tanggul Usman – Pelabuhan Biru	6,45 km
5	Tanggul Usman – Parang Gombong	14,5 km
6	Pelabuhan Biru – Parang Gombong	9,5 km

Sumber : Hasil Analisa Tim PKL Jawa Barat, 2021